



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILANDAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oni Choiruddin, SH., M.M.

Jabatan : Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rahman Hadi, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Desember 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. RAHMAN HADI, M.Si
NIP. 196909141990031004

Pihak Pertama,
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN,

ONI CHOIRUDDIN, SH., M.M.
NIP. 196804291997031001



**PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan fungsi legislasi	Rasio draft final rancangan undang-undang, pandangan pendapat yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI dari total draft final hasil rancangan undang-undang dan pandangan pendapat yang disiapkan oleh Deputi Bidang Persidangan	83	%
2.	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang professional sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft final hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI dari total draft final hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang disiapkan oleh Deputi Bidang Persidangan	85	%
3	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan fungsi pertimbangan serta produk DPD RI lainnya	Rasio draft final hasil pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft final pertimbangan yang dihasilkan	90	%
		Rasio draft final, peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI dari total draft final hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang disiapkan oleh Deputi Bidang Persidangan	90	%
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh Alat Kelengkapan DPD RI	Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI dari total penelitian, kajian, dan perancangan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Persidangan	81	%
5.	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal	Rasio hasil pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI dari total hasil pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah	76	%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian dilingkup Kedeputian Bidang Persidangan	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	3,4	Skala Likert (1-4)
7.	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI sesuai mekanisme	Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat	100	%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD	Rp 44,400,000,000
2.	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD RI, Dan Pengembangan Kerjasama DPD RI	Rp 95,627,747,000
3.	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, Dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	Rp 460,499,348,000
4.	Pengkajian Aspirasi Masyarakat Dan Kebijakan Anggaran Daerah	Rp 2,325,000,000
5.	Perancangan Perundang-Undangan Dan Pengkajian Kebijakan Hukum	Rp 2,125,000,000

Jakarta, 19 Desember 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS JENDERAL,


Dr. RAHMAN HADI, M.Si
NIP.196909141990031004

Pihak Pertama
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN,


ONI CHOIRUDDIN, SH., M.M
NIP.196804291997031001